



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : STAF KHUSUS MENTERI SEKRETARIS NEGARA
SUB UNIT KERJA : staf khusus menteri sekretaris negara bidang komunikasi politik dan kelembagaan

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NICOLAUS TEGUH BUDI HARJANTO
2. Jabatan : staf khusus menteri sekretaris negara bidang komunikasi politik dan kelembagaan
3. NHK : 460134

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m²/233 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/160 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m²/75 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.650.700.000**

1. MOBIL, MAZDA BIANTE MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000
3. MOBIL, MAZDA CX-9 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000
4. MOTOR, TRIUMPH SPEEDMASTER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
5. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 458.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 133.750.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 1.703.600.000**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.582.392.749
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	20.170.442.749
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	20.170.442.749

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.